

Standarisasi vs Diferensiasi: Dilema Kurikulum Nasional di Tengah Keragaman Indonesia

Renafa Pinky Santoso¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Article Info

Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 20, 2026

Accepted June 23, 2026

Keywords:

Kurikulum Nasional
Standarisasi
Diferensiasi
Keragaman
Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Kurikulum nasional di Indonesia berada dalam dinamika antara kebutuhan standarisasi dan tuntutan diferensiasi pembelajaran. Standarisasi berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pendidikan melalui penetapan kompetensi yang terukur, sementara diferensiasi diperlukan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan keragaman karakteristik peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dilema tersebut serta implikasinya terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan standarisasi berpotensi mengabaikan konteks lokal, sedangkan diferensiasi yang tidak terarah dapat menimbulkan ketimpangan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kurikulum yang adaptif dan seimbang untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia yang beragam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Renafa Pinky Santoso
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia
Jalan Gajayana No. 50, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
Email: renavanava@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kurikulum nasional di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan standarisasi dan tuntutan diferensiasi pembelajaran yang semakin kompleks. Secara ideal, kurikulum dirancang sebagai instrumen untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan sehingga setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografis, memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Hasil asesmen internasional seperti PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi peserta

didik Indonesia masih berada pada tingkat yang belum merata, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan kurikulum dan implementasinya di lapangan[1]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan kurikulum yang terlalu seragam cenderung kurang mampu mengakomodasi keragaman karakteristik peserta didik yang ada di Indonesia.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kurikulum di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan berbagai perspektif yang ditawarkan oleh para peneliti. Sebagian penelitian menekankan pentingnya standarisasi sebagai upaya menjaga mutu pendidikan melalui penetapan standar kompetensi yang jelas dan terukur secara nasional[2][3]. Di sisi lain, muncul pula kajian yang menggarisbawahi urgensi diferensiasi pembelajaran sebagai pendekatan yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan latar belakang peserta didik[4][5][6]. Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka juga menjadi fokus dalam berbagai penelitian sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjembatani kebutuhan antara standar nasional dan fleksibilitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan[7][8][9]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada praktik pembelajaran di kelas, sehingga belum banyak yang membahas hubungan antara standarisasi dan diferensiasi secara konseptual dan komprehensif.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang masih terbuka dalam kajian kurikulum di Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara standarisasi dan diferensiasi secara lebih mendalam. Banyak penelitian cenderung memposisikan kedua konsep tersebut sebagai dua pendekatan yang terpisah dan bahkan bertentangan satu sama lain. Padahal, dalam praktik pendidikan sehari-hari, standarisasi dan diferensiasi justru sering kali berjalan secara bersamaan dan saling memengaruhi dalam proses pembelajaran. Kurangnya kajian yang melihat hubungan ini secara integratif menyebabkan pemahaman terhadap kurikulum menjadi kurang utuh dan cenderung parsial. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menjembatani kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara standarisasi dan diferensiasi dalam kurikulum nasional Indonesia serta implikasinya terhadap praktik pembelajaran. Fokus kajian ini tidak hanya pada identifikasi peran masing-masing pendekatan, tetapi juga pada bagaimana keduanya dapat saling

melengkapi maupun menimbulkan ketegangan dalam implementasi kurikulum. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika tersebut. Analisis dilakukan secara kritis untuk menemukan pola hubungan yang dapat menjelaskan posisi kedua konsep tersebut dalam konteks pendidikan Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian kurikulum secara teoritis maupun praktis.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang mencoba melihat standarisasi dan diferensiasi sebagai dua unsur yang tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat dipadukan secara seimbang dalam desain kurikulum yang adaptif. Penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menekankan pentingnya menjaga standar nasional sekaligus memberikan ruang fleksibilitas bagi implementasi pembelajaran yang kontekstual. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran pendidikan global yang menekankan pentingnya kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan keragaman peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan kurikulum di Indonesia yang lebih inklusif dan relevan. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pendidik dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis konseptual mengenai hubungan antara standarisasi dan diferensiasi dalam kurikulum nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat teoritis dan membutuhkan penelaahan mendalam terhadap berbagai pemikiran, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sintesis pemikiran yang dapat memperkaya kajian kurikulum dalam konteks pendidikan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang diterbitkan dalam kurun waktu lima

tahun terakhir. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi isi, serta keterbaruan informasi yang disajikan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai referensi yang diperoleh dari basis data akademik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional, serta situs resmi lembaga pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus kajian, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi yang terstruktur. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta perbedaan pandangan yang muncul dalam berbagai sumber literatur. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas konseptual yang kuat serta mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika standarisasi dan diferensiasi dalam kurikulum nasional Indonesia.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Hakikat Standarisasi: Antara Penjaminan Mutu dengan Resiko Seragamisasi Pendidikan

Pendekatan standarisasi dalam kurikulum nasional dirancang sebagai upaya sistematis untuk menetapkan tolak ukur kompetensi minimum yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik di Indonesia. Secara konseptual, standarisasi berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang bertujuan memastikan bahwa setiap anak, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), menerima kualitas pengajaran yang setara[3]. Melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, hingga penilaian, pemerintah memiliki basis data yang objektif dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan secara besar, serta merumuskan beberapa kebijakan yang tepat bagi sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar[2].

Namun pada faktanya dominasi pendekatan standarisasi yang terlalu kaku dan bersifat *top-down* memicu risiko struktural berupa "seragamisasi" radikal yang mengabaikan kesenjangan yang nyata di lapangan. Ketika target capaian dan indikator keberhasilan disamaratakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur, keterbatasan akses teknologi, dan variasi kualitas pendidik, standarisasi justru berubah fungsi menjadi beban administratif dan psikologis bagi satuan pendidikan di daerah pinggiran[10]. Mekanisme evaluasi nasional yang terlalu standar sering kali memaksa sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya untuk berfokus pada pemenuhan formalitas dokumen akademis daripada hakikat kualitas interaksi pembelajaran di dalam kelas itu sendiri.

Dampak buruk dari penyeragaman ini adalah lahirnya ketidakadilan gaya baru dalam sistem pendidikan sosial budaya Indonesia. Alih-alih memperkecil jurang pemisah, standarisasi yang mengabaikan kesiapan dan konteks lokal berpotensi melestarikan marginalisasi terhadap sekolah-sekolah pedesaan yang tidak memiliki modal budaya dan finansial setara dengan sekolah perkotaan[11]. Kegagalan mendasar dalam melihat bahwa setiap wilayah memiliki titik awal (*starting point*) yang berbeda menyebabkan sekolah di daerah terpencil selalu dianggap "gagal" atau "tertinggal" menurut ukuran-ukuran standar yang cenderung terhadap realitas perkotaan yang mapan.

3.2. Urgensi Diferensiasi Pembelajaran: Mengakomodasi Keragaman Konteks dan Karakteristik Siswa

Sebagai kontradiksi dari model pengajaran satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*), diferensiasi pembelajaran menempatkan keunikan individu dan keragaman konteks sosial budaya sebagai titik awal dalam perancangan pengalaman belajar. Secara epistemologis, filsafat diferensiasi mengakui secara utuh bahwa setiap peserta didik membawa modal budaya, minat, tingkat kesiapan belajar (*readiness*), serta profil belajar yang berbeda ke dalam ruang kelas[12]. Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang berlapis secara sosial dan geografis, fleksibilitas diferensiasi memberikan validasi bagi pendidik untuk memodifikasi tiga elemen inti instruksional, yaitu konten materi, proses internalisasi pengetahuan, dan produk akhir yang dihasilkan siswa.

Implementasi diferensiasi secara objektif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan aktif (*student engagement*) dan menumbuhkan motivasi bawaan peserta didik secara signifikan. Ketika materi dan metode pembelajaran yang disajikan oleh guru memiliki

relevansi kontekstual dengan realita masyarakat di kehidupan sehari-hari siswa, pengetahuan menjadi lebih bermakna dan mudah diserap[13]. Fleksibilitas ini juga membebaskan guru dari keterikatan baku terhadap buku teks tunggal, sehingga mereka dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, kearifan lokal, serta sumber daya alam terdekat sebagai media pembelajaran yang kaya dan fungsional.

Lebih jauh lagi, dalam ekosistem pendidikan inklusif, pendekatan diferensiasi beralih peran menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi menjamin keadilan belajar di tingkat kelas. Diferensiasi memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan belajar khusus (*children with special needs*) maupun siswa yang memiliki keberbakatan intelektual di atas rata-rata dapat berkembang optimal sesuai kecepatan dan kapasitasnya masing-masing[14]. Melalui penyesuaian instruksional yang berpusat pada siswa ini, resiko pemisahan sosial di dalam sekolah dapat dikurangi, sehingga ruang kelas bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang inklusif, humanis, dan demokratis.

3.3. Kurikulum Merdeka sebagai Jembatan Integratif antara Standar Nasional dan Fleksibilitas Lokal

Langkah strategis Pemerintah Indonesia melalui pengenalan Kurikulum Merdeka dapat dimaknai sebagai pembangunan kebijakan yang bertujuan menjembatani dikotomi akut antara kebutuhan standarisasi dan tuntutan diferensiasi. Kurikulum baru ini tidak lagi memposisikan kedua konsep tersebut sebagai dua kutub ideologis yang saling menegaskan, melainkan sebagai kesatuan tata kelola yang komplementer. Standarisasi mutu secara garis besar tetap dipertahankan oleh negara melalui penetapan Capaian Pembelajaran (CP) yang berfungsi sebagai kompas kriteria kompetensi minimum nasional[15][16]. Namun, jalur operasional untuk mencapai standar kompetensi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada otonomi, kreativitas, dan diskresi profesional guru di tingkat satuan pendidikan.

Penggabungan konsep ini terwujud secara nyata melalui penekanan pada kebijakan pembelajaran berdiferensiasi yang didahului oleh pelaksanaan asesmen diagnostik secara berkala. Pendidik diwajibkan untuk memetakan kemampuan awal, hambatan belajar, serta kecenderungan minat siswa sebelum menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar yang dinamis. Melalui mekanisme menyeluruh ini, fleksibilitas pengajaran tidak berjalan secara liar tanpa arah, melainkan tetap terkontrol dan terarah demi pemenuhan capaian kompetensi dasar yang setara secara nasional.

Dengan demikian, sinergi dalam Kurikulum Merdeka menempatkan standar nasional sebagai koridor atau tujuan akhir yang menjamin kesetaraan mutu ijazah lulusan antarwilayah di Indonesia. Di sisi lain, diferensiasi bertindak sebagai strategi taktis-operasional yang rutanya dapat diadaptasi secara luwes sesuai kondisi geografis, kapasitas ekonomi sekolah, serta karakteristik sosiologis masyarakat setempat[17]. Pola hubungan ini membuktikan bahwa penjaminan mutu pendidikan skala nasional dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap keragaman lokal tanpa harus mengorbankan salah satunya.

3.4. Tantangan Praktis dan Strategi Rekonsiliasi Paradigma Kurikulum yang Adaptif

Meskipun secara teoretis dan konseptual Kurikulum Merdeka menawarkan jalan tengah yang menjanjikan, implementasi integrasi standarisasi-diferensiasi di lapangan masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang beragam. Tantangan sosiopedagogis yang paling mendasar adalah kuatnya belenggu kenyamanan guru terhadap budaya komunikasi satu arah, dimana penyampaian materi berpusat pada guru yang telah mengakar selama puluhan tahun akibat pola kurikulum terdahulu. Banyak pendidik mengalami kebingungan dan kesulitan teknis ketika dituntut untuk merancang instrumen asesmen diagnostik serta mengelola kelas heterogen yang membutuhkan perlakuan instruksional yang berbeda-beda[18].

Di samping itu, dualisme kebijakan yang terkesan belum sepenuhnya selaras di tingkat tinggi turut memperlambat efektivitas transformasi kurikulum ini di tataran praktis. Tuntutan evaluasi berskala besar seperti Asesmen Nasional (AN) yang berbasis komputerisasi dan memiliki indikator standar tinggi sering kali menimbulkan bias kecemasan bagi sekolah-sekolah di daerah minim fasilitas. Akibat ketakutan akan penurunan citra atau raport mutu sekolah secara administratif, tidak sedikit guru yang akhirnya memilih jalan pintas dengan kembali menerapkan metode ceramah tradisional yang berorientasi pada hafalan materi demi mengejar skor kognitif ujian secara instan[19][20].

Untuk memecahkan dilema paradigmatik tersebut, diperlukan strategi rekonsiliasi yang komprehensif melalui restrukturisasi program pembinaan guru secara berkelanjutan (continuous professional development). Pelatihan tidak boleh lagi sekadar berfokus pada sosialisasi dokumen administratif dan pengisian aplikasi digital, melainkan harus menyentuh penguatan literasi pedagogi diferensiasi dan kemampuan reflektif guru[21]. Pemerintah bersama pemerintah daerah juga wajib mendesentralisasikan sistem pendukung evaluasi serta memberikan ruang diskresi yang aman bagi para pendidik untuk berinovasi

memanfaatkan potensi lokal tanpa dibayangi oleh sanksi administratif atau penilaian rapor mutu yang diskriminatif[22].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah teoretis dan analisis kritis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dikotomi antara standarisasi dan diferensiasi dalam kurikulum nasional Indonesia bukanlah sebuah jalan buntu, melainkan sebuah dinamika logis yang saling membutuhkan. Standarisasi tetap mengemban posisi penting sebagai modal dasar guna menjamin batas minimum mutu lulusan antarwilayah demi menjaga integrasi kualitas pendidikan nasional. Di sisi lain, diferensiasi pembelajaran hadir sebagai prinsip moral dan sosiopedagogis pada tingkatan atas. Pendekatan diferensiasi memastikan bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh negara dapat dicapai secara manusiawi oleh peserta didik yang berpijak pada garis awal (*starting point*), modal budaya, kapasitas kognitif, serta tantangan geografis yang sangat beraneka ragam.

Kehadiran Kurikulum Merdeka secara konseptual terbukti berhasil menyusun kerangka dasar dengan memadukan kedua pendekatan tersebut ke dalam satu struktur tata kelola yang saling menyempurnakan. Melalui pemisahan yang tegas antara tujuan akhir berupa Capaian Pembelajaran (CP) yang dikunci oleh pusat, serta fleksibilitas rute pembelajaran kepada guru, kurikulum ini memberikan kedaulatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran berbasis asesmen diagnostik. Kerja sama ini memosisikan standar nasional sebagai kompas penunjuk arah, sementara strategi diferensiasi bertindak sebagai kendaraan adaptif yang jalurnya disesuaikan dengan denyut kearifan lokal serta budaya satuan pendidikan masing-masing.

Dengan demikian, transformasi kurikulum ini masih menyisakan celah kesenjangan yang tinggi antara level kebijakan ideal dan kenyataan metode di lapangan. Penggabungan standarisasi-diferensiasi di tingkat pembelajaran masih mendapatkan tantangan budaya yaitu guru yang terbiasa dengan pola komunikasi satu arah terdahulu, serta diperparah oleh adanya dualisme tujuan evaluasi besar. Selama indikator keberhasilan sekolah masih bertumpu pada standarisasi kuantitatif tinggi yang kaku layaknya skor Asesmen Nasional atau Rapor Pendidikan, guru akan cenderung berorientasi pada hasil nyata dengan mengabaikan fleksibilitas belajar demi mengejar formalitas administratif. Oleh sebab itu, keberhasilan kurikulum adaptif ini ke depan memerlukan perbaikan mendasar pada sistem pendukung

evaluasi negara serta komitmen pembinaan guru yang berfokus pada penguatan evaluasi diri dalam pembelajaran, bukan sekadar patuh pada sistem pendidikan digital yang baku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. State, *PISA 2022 Results*, vol. I. 2022.
- [2] A. Ikbali, Andrianto, dan A. Lahmi, "Standar Nasional Pendidikan dalam mendukung Pengembangan Kurikulum Pendidikan," *Sulawesi Tenggara Educ. J.*, vol. 4, no. 3, hal. 109–115, 2024.
- [3] R. Setiana, S. Fauziyyah, dan S. Ramdani, "Standarisasi Pendidikan Nasional," *JIPJurnal Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 19, hal. 1797–1808, 2024.
- [4] A. Malik, "Penerapan Pendekatan Diferensiasi dalam Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar," *Saraweta J. Pendidik. dan Kegur. Vol.*, vol. 2, no. 02, hal. 291–300, 2024.
- [5] M. H. Islam, "Aplikasi dan Diferensiasi Pendidikan Islam," *Humanistika*, vol. 5, no. 1, hal. 73–95, 2019.
- [6] A. F. R. Karim, M. M. Ibrahim, dan N. Yusuf, "Implementasi Kurikulum Diferensiasi Pendidikan Kewarganegaraan Pada Kelas Akselerasi Peserta Didik Cerdas Inklusif MTsN Ponorogo," *J. Civ. Huk.*, vol. 3, no. 2, hal. 138–148, 2018.
- [7] A. Fauzi, "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak," *J. Pahlawan*, vol. 18, no. 2, hal. 18–22, 2022.
- [8] J. Alimuddin, "Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *J. Ilm. Kontekst.*, vol. 4, no. 02, hal. 67–75, 2023.
- [9] Yunita, A. Zainuri, Ibrahim, A. Zulf, dan Mulyadi, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar," *Jambura J. Educ. Manag.*, vol. 4, no. 1, hal. 16–25, 2023.
- [10] P. Sahlberg, "Does the pandemic help us make education more equitable?," *Educ. Res. Policy Pract.*, vol. 20, no. 1, hal. 11–18, 2021, doi: 10.1007/s10671-020-09284-4.
- [11] A. Yusuf dan M. Hanif, "Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia," *J. Inov. Penelit. Ilmu Pendidik. Indones.*, vol. 2, no. 3, hal. 153–166, 2025.
- [12] I. Pasira, "Assessing the Effectiveness of Differentiated Instruction Strategies in Diverse Classrooms," no. 2018, hal. 31–36, 2022.
- [13] A. M. Gymnastiar, "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Kelas," *El - Banar J. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 07, no. 02, hal. 24–45, 2024.
- [14] Irmayanti, "Inovasi Pembelajaran Agama Islam : Pendekatan Diferensiasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus Pendahuluan Kajian Teori," *Tut Wuri Handayani J. Kegur. dan Ilmu Pendidik.*, vol. 4, no. 2, hal. 106–112, 2025.
- [15] Y. Safitri dan S. Julaiha, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah," *Andragogi J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 1, hal. 1–8, 2026, doi: 10.31538/adrg.v6i1.2691.
- [16] D. Irma dan Suparto, "Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi : Kajian Kebijakan di Indonesia," *IHSAN J. Pendidik. Islam*, vol. 3, no. 3, hal. 513–520, 2025, doi: <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1264>.
- [17] S. Normawati, "Tela ' ah terhadap Sinkronisasi Kurikulum Nasional dan Daerah dalam Konteks Otonomi Pendidikan," *J. DIDACTA*, vol. I, no. 2, hal. 44–58, 2025.
- [18] A. R. BP, S. A. Munandar, A. Fitriani, Y. Karlina, dan Yumrian, "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan," *Al Urwatul Wutsqa Kaji*.

- Pendidik. Islam*, vol. 2, no. 1, hal. 1–8, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>
- [19] I. Journal dan M. Education, “Assessing Preservice Teachers ’ Perceptions and Practices to Differentiate Instruction for Culturally and Linguistically Diverse Students in Secondary Classrooms Amani Zaier Texas Tech University Faith Maina,” vol. 24, no. 2, hal. 1–16, 2022.
- [20] A. Z. Fachrina, D. Gusrayani, dan D. Djuanda, “Persepsi Guru Mengenai Pembelajaran Berdiferensiasi di SD Negeri Gandasari II,” *J. Edu Res. Indones. Inst. Corp. Learn. Stud. Page*, vol. 5, no. September, hal. 30–39, 2024.
- [21] F. Ramadan dan I. Tabroni, “Implementasi kurikulum merdeka belajar,” *Lebah*, vol. 13, no. 2, hal. 2–5, 2020.
- [22] Khoiruman, W. A. Fikriyy, dan M. A. S. Rizal, “Desain kurikulum pendidikan berbasis inklusi adaptif merdeka,” *Gahwa J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 2, no. 1, hal. 1–15, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/gahwa%0ADESAIN>